

ANALISIS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA KEDIRI TAHUN 2015

Diah Tri Hermawati

hermawati_diah@uwks.ac.id

Dosen pada Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2015 bertujuan untuk menjelaskan kinerja TKPK Kota Kediri dalam menyelenggarakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah, menjelaskan pelaksanaan kebijakan (program, anggaran dan regulasi) penanggulangan kemiskinan di daerah dan menjelaskan pencapaian daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan penelitian ini metode yang digunakan yaitu dilakukan pengumpulan data di wilayah administrasi Pemerintah Kota Kediri dengan menggunakan subyek data yang paling dapat dipercaya (*valid*) dan terbaru (*update*) yang dimiliki daerah bersangkutan.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2013, capaian prosentase penduduk miskin di Kota Kediri (sebesar 8,20%), masih jauh dari target pencapaian RPJMN maupun target MDG's yang mencanangkan capaian minimal 8% pada tahun 2014. Capaian prosentase penduduk miskin Kota Kediri pada tahun 2013, masih di atas (lebih buruk) capaian di tingkat Propinsi Jawa Timur (12,73%) maupun rata-rata capaian secara Nasional (10,96%) pada tahun yang sama; Perkembangan capaian prosentase penduduk miskin di Kota Kediri selama 5 tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan trend perkembangan yang menurun (semakin membaik) meskipun capaian pada tahun 2014 sedikit meningkat dibanding tahun 2013; Capaian indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2013 masing-masing adalah 1,60% dan 0,47%. Capaian keduanya di bawah capaian di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Perkembangan capaian keduanya selama 5 tahun terakhir (tahun 2009-2013) menunjukkan trend perkembangan yang semakin membaik.

Kata kunci : Kemiskinan, RPJMN, MDG's.

PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan permasalahan fundamental yang sejak berabad-abad lalu hingga saat ini masih dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk juga Indonesia. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan harus segera ditangani melalui implementasi langkah-langkah penanggulangan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi beban rakyat miskin dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, ber-keadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Upaya penanggulangan kemiskinan akan dinyatakan efektif bila menunjukkan indikasi menurunnya jumlah penduduk miskin, bertambahnya tingkat pen-dapatan individu, dan menguatnya daya beli masyarakat. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan wujud intervensi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi menyeluruh hingga ke tingkat daerah. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi guna menjaga konsistensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan, sehingga dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mekanisme kerja tim ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 sebagai salah satu mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional.

Sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawabnya, TKPK Daerah berpartisipasi dalam menentukan arah perencanaan di daerahnya. Dimensi penyusunan kebijakan yang tepat melalui perencanaan dan penyusunan anggaran menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh TKPK Daerah.

Tingkat kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2012 oleh BPS tercatat sebesar 8,11 persen sedangkan tahun 2013 naik menjadi 8,20 persen. Meski demikian pada tahun yang sama (tahun 2013), tingkat kemiskinan Kota Kediri masih lebih rendah dari angka Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 12,73 persen dan angka nasional sebesar 11,47 persen. Dalam menghadapi hal tersebut Pemerintah Kota Kediri mencanangkan berbagai program penang-gulungan kemiskinan, baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri, maupun program-program yang pendanaannya sharing dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dengan sasaran penerima manfaat adalah masyarakat/rumah tangga miskin.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah maka dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Tugas TKPK Kabupaten sebagaimana tertuang dalam pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah melakukan koordinasi serta mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. TKPK Kabupaten memiliki kewajiban untuk menyampaikan Analisis Tahunan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Analisis tersebut dapat digunakan untuk menilai efektifitas program penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan. Sehingga Analisis ini bermanfaat sebagai bahan per-timbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang.

Tujuan Kajian

Adapun tujuan Analisis Pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2014 di Kota Kediri adalah:

1. menjelaskan kinerja TKPK Kota Kediri dalam menyelenggarakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah;
2. menjelaskan pelaksanaan kebijakan (program, anggaran dan regulasi) penanggulangan kemiskinan di daerah;
3. menjelaskan pencapaian daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu manfaat penyusunan LP2KD Kota Kediri tahun 2014 adalah tersedianya informasi pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri tahun 2014 dalam bentuk Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kota Kediri tahun 2015;

Permasalahan

Dalam menjalankan fungsi koordinasi dan Monitoring evaluasi, TKPK Kota Kediri belum menghadapi permasalahan serius dalam pelaksanaan peran dan fungsi koordinasi penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan yang dijalankan oleh SKPD-SKPD di Kota Kediri. Meskipun demikian beberapa kendala teknis dan kebijakan perlu diupayakan penyelesaiannya agar TKPKD dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri dapat lebih berjalan dengan optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan kecenderungan terjadinya pergeseran. Sebelumnya, kemiskinan dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, seperti aspek pendapatan, pengeluaran atau aset/faktor produksi. Pemahaman tersebut diantaranya seperti direpresentasikan oleh dua lembaga keuangan internasional, World Bank dan Asian Development Bank (ADB). World Bank menetapkan kategori miskin bila tingkat pengeluaran kurang dari US\$ 2 PPP per orang per hari. Pandangan tak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Mc.Quibria, seorang Ekonom Senior pada Asian Development Bank (ADB). Menurutnya, seseorang maupun sekelompok orang baik laki maupun perempuan dikatakan miskin bila tidak mampu menggunakan aset/modal yang dimilikinya. Seseorang miskin, bila hanya punya aset tenaga namun tidak bekerja atau tinggal di desa, namun tidak punya tanah (sawah atau kebun).

Namun Saat ini, pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan telah berkembang mencakup dimensi kehidupan yang jauh lebih luas. Wacana tentang kemiskinan telah bersifat multi dimensi, baik budaya, sosial, ekonomi maupun politik. Dampak kemiskinan juga disadari bersifat multi dimensi. Karenanya, strategi dan kebijakan yang digunakan dalam mengatasi persoalan kemiskinanpun cenderung menjadi komprehensif dan lintas sektor. Kemiskinan juga dapat di pandang dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut memandang kemiskinan dengan pendekatan berdasar identifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu, sedangkan kemiskinan relatif adalah pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan atau dengan kata lain kemiskinan relatif berkaitan erat dengan distribusi pendapatan.

Sedangkan cara pandang kemiskinan yang dikemukakan dalam dokumen SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan) adalah bahwa kemiskinan dapat dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya secara layak untuk memenuhi dan mengembangkan kehidupannya yang layak. Cara pandang terhadap kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengacu bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara baik.

Dalam SNPK dinyatakan bahwa, hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Disamping mengukur kemiskinan dengan menggunakan nilai garis kemiskinan seperti yang dijelaskan di atas sehingga dihasilkan data makro kemiskinan berupa angka jumlah penduduk miskin yang sering digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa, Pemerintah melalui BPS juga melakukan pengukuran dengan menggunakan pendekatan akses terhadap kebutuhan/ pelayanan dasar (kemiskinan non pendapatan) yang dicerminkan dalam 14 indikator. Angka yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan ini berupa data jumlah Rumah Tangga Sasaran dan data jumlah (individu/jiwa) anggota Rumah Tangga. Bahkan sejak tahun 2005 melalui survey PSE-05 dan di tahun 2008 diperbaharui melalui PPLS-08 (pada tahun 2011 diperbaharui kembali melalui PPLS-2011) dapat menunjukkan identitas individu dan keberadaan/ alamat rumah tangga. Data yang dihasilkan dengan pendekatan ini disebut dengan data mikro kemiskinan.

Dengan digunakannya konsep kemiskinan berbasis hak, maka dalam SNPK juga dinyatakan, kemiskinan dipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak terpenuhinya hak. Kemiskinan juga dipandang sebagai proses perampasan atas daya rakyat miskin. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.

Disamping permasalahan pemenuhan hak-hak dasar, dokumen SNPK juga memandang persoalan kemiskinan dari sudut pandang persoalan beban kependudukan dan permasalahan ketidakadilan dan kesenjangan gender serta permasalahan kesenjangan antar wilayah. Dokumen SNPK juga memandang

bahwa Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kondisi dan permasalahan kemiskinan secara tidak langsung tergambar dari fakta yang diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat miskin itu sendiri, temuan dari berbagai kajian, dan indikator sosial dan ekonomi yang dikumpulkan dari kegiatan sensus dan survei.

Sementara itu, secara nasional *Pemerintah melalui BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang maupun sekelompok orang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran*. Dalam implementasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak di konsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin. Sedangkan kebutuhan non makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. *Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Angka jumlah penduduk miskin tersebut disebut juga sebagai Poverty Headcount Index atau P0. Dan jumlah penduduk yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan ini sering juga disebut sebagai Poverty Incidence.*

Disamping mengukur kemiskinan dengan menggunakan nilai garis kemiskinan seperti yang dijelaskan di atas sehingga dihasilkan data makro kemiskinan berupa angka jumlah penduduk miskin yang sering digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa, Pemerintah melalui BPS juga melakukan pengukuran dengan menggunakan pendekatan akses terhadap kebutuhan/ pelayanan dasar (kemiskinan non pendapatan) yang dicerminkan dalam 14 indikator. Angka yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan ini berupa data jumlah Rumah Tangga Sasaran dan data jumlah (individu/jiwa) anggota Rumah Tangga. Bahkan sejak tahun 2005 melalui survey PSE-05 dan di tahun 2008 diperbaharui melalui PPLS-08 (pada tahun 2011 diperbaharui kembali melalui PPLS-2011) dapat menunjukkan identitas individu dan keberadaan/ alamat rumah tangga. Data yang dihasilkan dengan pendekatan ini disebut dengan data mikro kemiskinan.

METODOLOGI

Lokasi penyusunan dokumen LP2KD (Analisis Pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan Daerah) dilakukan di wilayah administrasi Pemerintah Kota Kediri dengan menggunakan subyek data yang paling dapat dipercaya (*valid*) dan terbaru (*update*) yang dimiliki daerah bersangkutan.

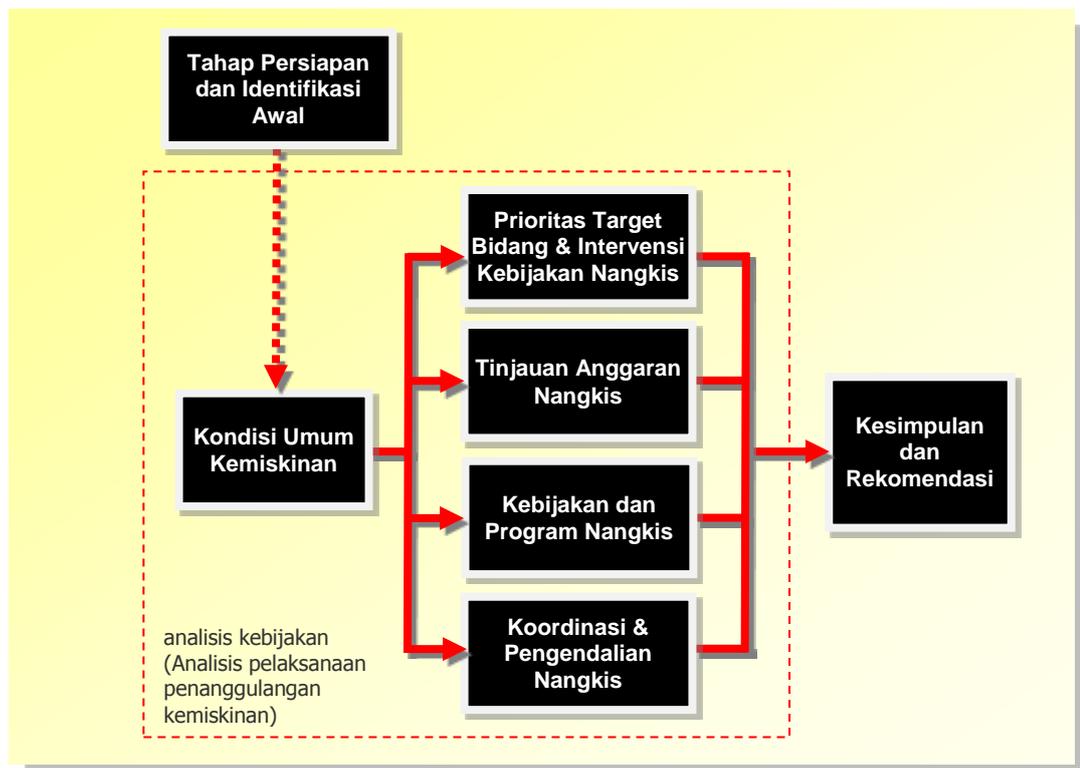
Tahapan Proses Penyusunan Dokumen LP2KD.

Penyusunan Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Kediri tahun 2014, mengacu pada:

- 1) Panduan Penanggulangan Kemiskinan – Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, yang diterbitkan oleh TNP2K, tahun 2011;
- 2) Modul-modul pelatihan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan bagi tim teknis TKPK oleh TNP2K, tahun 2012.

Dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut:

Gambar 1: Tahapan Proses Penyusunan LP2KD



KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKISKINAN

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi concern seluruh bangsa-bangsa di dunia. Setiap negara mengembangkan kebijakan dan program yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melepaskan diri dari simpul-simpul kemiskinan. Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan disusun dengan prinsip sinergistik antara dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa turut berkontribusi dengan menetapkan kebijakan menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Awal tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat rumusan tujuan-tujuan pembangunan abad 21 (Millenium Development Goals / MDGs), meliputi:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
- 2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- 4) Menurunkan angka kematian anak
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
- 7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan
- 8) Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Bagi Bangsa Indonesia penanggulangan kemiskinan merupakan manifestasi cita-cita perjuangan bangsa sejak zaman penjajahan. Dan di era globalisasi ini solusi atas kemiskinan bangsa membutuhkan terobosan dan kreativitas seiring dengan kian beragam dan kompleks-nya faktor-faktor penyebab kemiskinan.

Sejalan dengan kebijakan nasional dalam penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Kediri telah merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Kediri dengan kerangka lokal, regional, nasional maupun global. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri, adalah sebagai berikut:

- 1) Mengintegrasikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan rumusan tujuan pembangunan millenium (MDG's).
- 2) Melaksanakan dan mendukung program dan kegiatan penang-gulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi secara terintegrasi dengan program dan kegiatan daerah.
- 3) Mengembangkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada karakter dan potensi lokal.

Adapun dukungan kebijakan Pemerintah Kota Kediri, sebagai wujud komitmen dalam penanggulangan kemiskinan adalah meliputi:

- Produk peraturan perundangan
- Strategi penanggulangan kemiskinan,
- Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan,
- Program penanggulangan kemiskinan unggulan
- Hasil monev program penanggulangan kemiskinan unggulan.

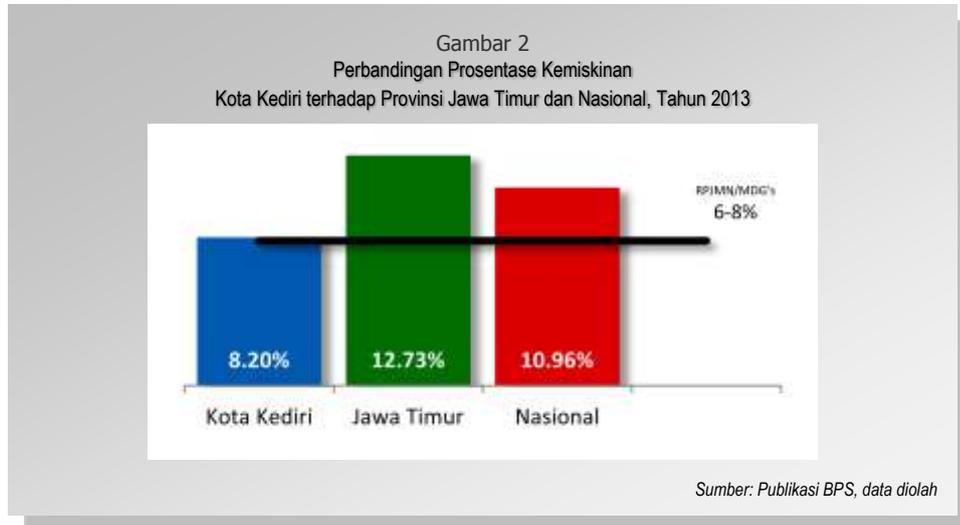
Strategi Penanggulangan Kemiskinan.

Pada dasarnya rumusan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri merupakan tindak lanjut dari strategi tingkat Nasional yang tertuang dalam pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Strategi ini kemudian dijabarkan dan disesuaikan dengan kondisi aktual di Kota Kediri.

Strategi dasar percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut adalah:

- (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;

- (4) penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan Kota Kediri dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

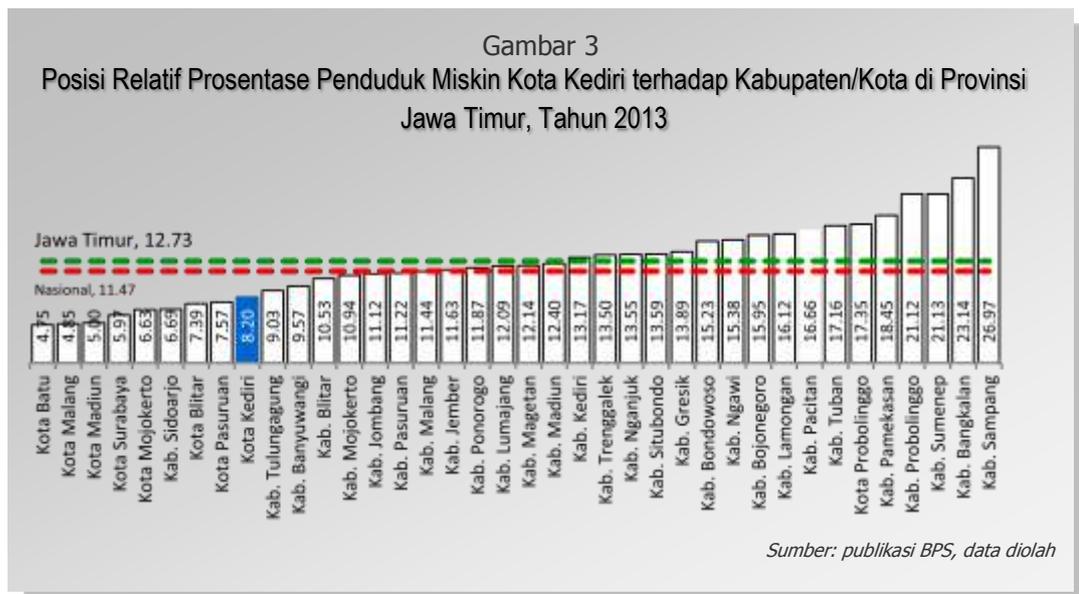


KONDISI UMUM KEMISKINAN DI KOTA KEDIRI

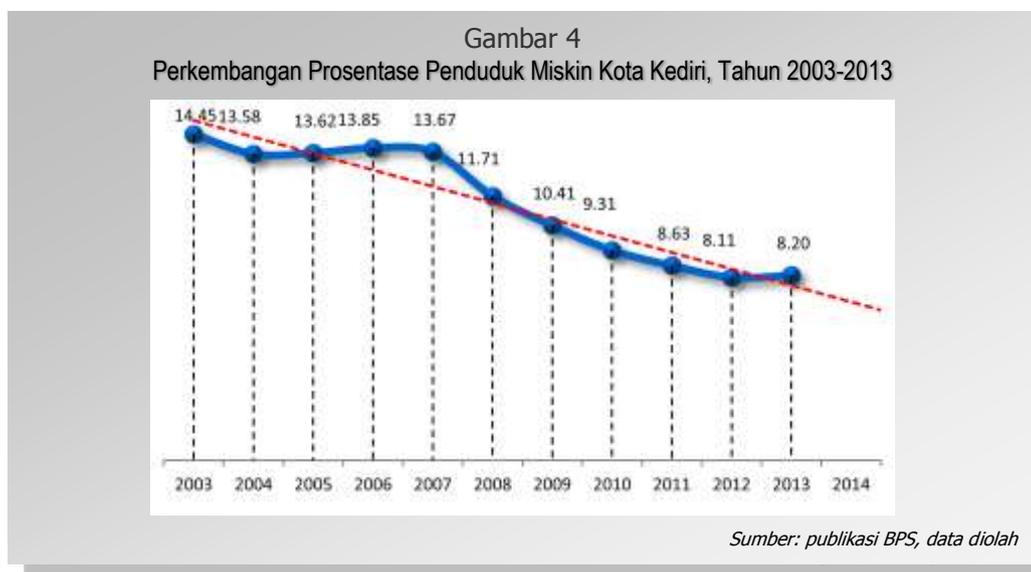
Prosentase penduduk miskin di Kota Kediri pada tahun 2013 adalah sebesar 8,20%, mengalami kenaikan sebesar 0,9% jika dibandingkan dengan tahun 2012. Bila melihat prosentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, di mana pada tahun yang sama prosentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebesar 12,73% sedangkan prosentase penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar 11,47%, maka prosentase penduduk miskin di Kota Kediri lebih baik karena berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, prosentase penduduk miskin di Kediri pada Tahun 2013 (gambar 3) menunjukkan posisi urutan ke 9 (sembilan) terendah.

Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015
(Diah Tri Hermawati)

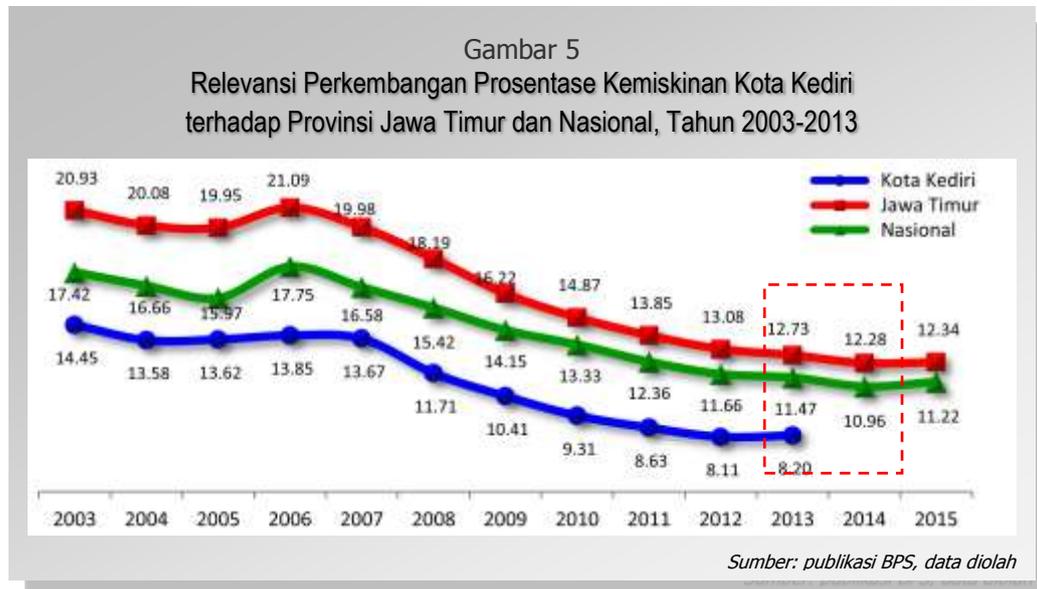


Selama periode tahun 2003-2013, prosentase penduduk miskin di Kota Kediri menunjukkan trend menurun (gambar 4). Dengan trend prosentase penduduk miskin yang menurun menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Kediri beserta stakeholder dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Nasional melalui program dan kegiatan pembangunan, khususnya penanggulangan kemiskinan, telah mampu dan berhasil menekan angka kemiskinan secara signifikan.



Perkembangan prosentase penduduk miskin di Kota Kediri meskipun menunjukkan trend menurun selama periode tahun 2003-2013 dan secara umum dapat dinyatakan sejalan (relevan) dengan perkembangan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, akan tetapi pada periode 2012-2013 tidak sejalan (tidak relevan) dengan perkembangan capaian prosentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun tersebut, prosentase penduduk

miskin di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional me-nunjukkan penurunan, tetapi di Kota Kediri justru sebaliknya (gambar 5).

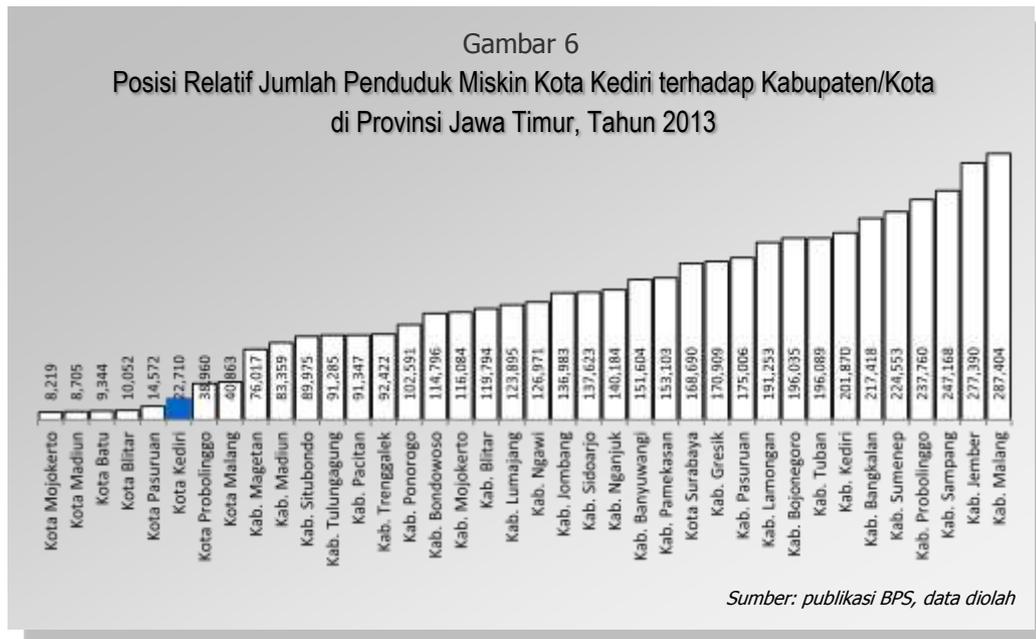


Perkembangan prosentase penduduk miskin yang menunjukkan relevansi antara capaian di tingkat Kabupaten/Kota dengan di tingkat Provinsi dan Nasional menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota dalam menurunkan angka kemiskinan melalui program dan kegiatan pembangunan telah sejalan dengan upaya-upaya di tingkat Provinsi maupun secara Nasional. Sebaliknya, perkembangan prosentase kemiskinan yang tidak memiliki relevansi, maka upaya-upaya yang dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota belum atau tidak sejalan dengan upaya di tingkat Provinsi maupun Nasional.

Dengan prosentase kemiskinan sebesar 8,20%, jumlah penduduk miskin di Kota Kediri pada tahun 2013 adalah sebanyak 22.710 jiwa. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur adalah sebesar 4.893.003 jiwa dan total penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar 28.553.974 juta jiwa. Dengan demikian Kota Kediri pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 0,46% terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dan sebesar 0,08% pada jumlah penduduk miskin secara Nasional.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, posisi relatif jumlah penduduk miskin Kota Kediri pada tahun 2013 menempati urutan ke 6 (gambar 6).

Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015
(Diah Tri Hermawati)



Selama periode tahun 2003-2013, perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Kediri bersifat fluktuatif. Meskipun demikian selama periode tersebut trend perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Kediri menunjukkan trend yang menurun (gambar 7). Trend perkembangan jumlah penduduk miskin yang menurun menjadi indikasi bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri beserta stakeholder melalui program dan kegiatan pembangunan yang penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota Kediri. Meski demikian, perlu menjadi perhatian mengingat pada tahun 2013 terjadi sedikit kenaikan jumlah penduduk miskin terhadap tahun 2012.



Relevansi dan Efektivitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan.

Dari hasil tinjauan anggaran penanggulangan kemiskinan dalam APBD Kota Kediri selama tahun 2012-2014, disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 1:
Ringkasan Relevansi Dan Efektifitas Anggaran Terhadap
Perbaikan Capaian Indikator Bidang.

Sektor	Perkembangan Anggaran (3 th terakhir)	Perkembangan Bidang Kemiskinan		Relevansi	Efektifitas
		Indi-kator	Kondisi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ketenaga-kerjaan	Meningkat	TPT	Capaian tahun ini sedikit me-ningkat dari tahun lalu. Trend 3 th terakhir cenderung me-ningkat	☒	☒
Kesehatan	Menurun	AKB	Capaian tahun ini lebih baik dari yang lalu dengan trend perkembangan 3 th terakhir kian membaik	☒	-
		AKI	Capaian tahun ini lebih buruk dari yg lalu dengan trend line 3 th terakhir tergambar menurun	✓	☒
		Prevalensi Gizi Balita	Capaian tahun ini lebih baik dari yang lalu dengan trend line 3 th terakhir tergambar menurun	☒	-
Pendidikan	Meningkat	APK SD/MI	Membaik dalam 3 tahun terakhir	✓	✓
		APK SMP/MTs	Memburuk dalam 3 tahun terakhir	☒	☒
		APK SMA/MA/SMK	Memburuk dalam 3 tahun terakhir	☒	☒
		APM SD/MI	Membaik dalam 3 tahun terakhir	✓	✓
		APM SMP/MTs	Membaik dalam 3 tahun terakhir	✓	✓
		APKMSMA/MA/SMK	Membaik dalam 3 tahun terakhir	✓	✓
		AptS usia 7-12 th	Membaik dalam 3 tahun terakhir	✓	✓
		AptS usia 13-15 th	Capaian tahun ini lebih buruk dari yg lalu	☒	☒

Sektor	Perkembangan Anggaran (3 th terakhir)	Perkembangan Bidang Kemiskinan		Relevans	Efektifitas
		Indi-kator	Kondisi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dengan trend line 3 th terakhir tergambarkan menurun		
		AptS 16-18	Fliktuasi	✓	✓
Infrastruktur Dasar	menurun	Akses Air minum	Memburuk dalam 3 tahun terakhir	✓	☒
		Akses Sanitasi Dasar	Membaik dalam 3 tahun terakhir	☒	-
		Akses Liasrik	Membaik dalam 3 tahun terakhir	☒	-
Ketahanan Pangan	---	---	---	---	---
Keterangan: ✓ = ya ☒ = tidak - = tidak diukur					

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kondisi kemiskinan Kota Kediri, sebagaimana diuraikan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sampai dengan tahun 2013, capaian prosentase penduduk miskin di Kota Kediri (sebesar 8,20%), masih jauh dari target pencapaian RPJMN maupun target MDG's yang menencanakan capaian minimal 8% pada tahun 2014.
- 2) Capaian prosentase penduduk miskin Kota Kediri pada tahun 2013, masih di atas (lebih buruk) capaian di tingkat Propinsi Jawa Timur (12,73%) maupun rata-rata capaian secara Nasional (10,96%) pada tahun yang sama;
- 3) Perkembangan capaian prosentase penduduk miskin di Kota Kediri selama 5 tahun terakhir (2009-2013) menunjukkan trend perkembangan yang menurun (semakin membaik) meskipun capaian pada tahun 2014 sedikit meningkat dibanding tahun 2013;
- 4) Capaian indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2013 masing-masing adalah 1,60% dan 0,47%. Capaian keduanya di bawah capaian di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Perkembangan capaian keduanya selama 5 tahun terakhir (tahun 2009-2013) menunjukkan trend perkembangan yang semakin membaik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial, Jakarta. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kementerian Dalam Negeri. 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), Jakarta.

Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Kediri, Tahun 2015

(Diah Tri Hermawati)

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2011, Panduan Penanggulangan Kemiskinan–Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, cetakan kedua, Mei 2011, Jakarta.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2012, Panduan pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan – Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, cetakan pertama, September 2012, Jakarta.